

Risteruw Leonardo Firmansyah¹, Said Bambang Nurcahya², Aria Mariany³

ANALISIS PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI KABUPATEN CIANJUR

Risteruw Leonardo Firmansyah¹, Said Bambang Nurcahya², Aria Mariany³

¹(Prodi Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan, Indonesia)

²(Prodi Administrasi Perkantoran, Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Indonesia)

³(Pusat Penelitian Mitigasi Bencana (PPMB) ITB, Indonesia)

risteruw.leonardo@uniku.ac.id¹, said.bambangnurcahya@poljan.ac.id², ariamariany19@gmail.com³

Abstract

As one of the countries that often faces natural disasters, Indonesia has created guidelines for handling rehabilitation and reconstruction after natural disasters. Various disasters, especially earthquakes, are natural disasters that take a lot of lives and material, so the author tries to analyze the handling of earthquake disasters that occur in the Regency. Cianjur in November 2022. This research method uses a qualitative approach with content analysis, namely conducting an analysis of reconstruction and rehabilitation after the earthquake disaster. Theories related to disasters have experienced a paradigm shift from pure science to applied science, although most of these disaster theories originate from practice and are then turned into theories. There is an interesting issue that arises, namely that disaster risk information provided by the government is not always accepted by the public. Some researchers offer through risk communication. However, the community also has its own information regarding disaster risks in their area. So it is not uncommon for people who believe in their beliefs and are attached to their region to not want to move from their region, even though it is declared by the government as an area that has a high level of risk for a particular disaster. Slow handling, especially during emergencies and after disasters, is caused by weak human resources. This can be overcome one way through good coordination and collaboration between stakeholders. Analysis of psychological, health and humanitarian rehabilitation as well as reconstruction of infrastructure, public facilities and settlements that have been carried out by the Cianjur Regency BPBD and the Cianjur Regency PUPR.

Keywords: Rehabilitation; Reconstruction; Post-Earthquake Management; Disaster.

Abstrak

Sebagai salah satu negara yang sering menghadapi bencana alam, Indonesia telah membuat pedoman penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, Berbagai kejadian bencana khususnya gempa bumi adalah bencana alam yang memakan banyak korban jiwa dan material sehingga penulis mencoba menganalisa penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada tahun November 2022. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *content analysis*, yaitu melakukan analisis terhadap Rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi. Teori terkait kebencanaan ini mengalami pergeseran paradigma dari sains murni menjadi *applied science*, meskipun sebagian besar teori kebencanaan ini berasal dari praktik yang kemudian diangkat menjadi teori. Terdapat isu menarik yang muncul yaitu informasi risiko bencana yang ada dari pemerintah tidak selalu diterima oleh masyarakat. Beberapa peneliti menawarkan melalui komunikasi risiko. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki informasi tersendiri mengenai risiko bencana di daerahnya. Sehingga tidak jarang, masyarakat yang percaya akan keyakinannya dan memiliki keterikatan dengan wilayahnya tidak ingin pindah dari wilayahnya, meskipun dinyatakan oleh pemerintah sebagai daerah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap suatu bencana tertentu. Penanganan yang lambat, khususnya pada saat darurat dan pasca bencana disebabkan lemahnya sumber daya manusia. Hal ini dapat diatasi salah satunya melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan. Analisis Rehabilitasi psikologi, kesehatan, dan kemanusiaan serta rekonstruksi infrastruktur, Sarana Umum dan permukiman yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Cianjur dan Dinas PUPR Kabupaten Cianjur.

Risteruw Leonardo Firmansyah¹, Said Bambang Nurcahya², Aria Mariany³

Kata Kunci: *Rehabilitasi; Rekonstruksi; Penanganan Pasca Gempa Bumi; Kebencanaan.*

Corresponding author : said.bambangnurcahya@poljan.ac.id²

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana. Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini telah menarik perhatian banyak orang. Perhatian terhadap bencana ini diawali dari kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menyebabkan 165.708 orang meninggal serta kerugian mencapai US\$ 4,450 juta (Hadi, 2010). Tabel 1 berikut menunjukkan sejumlah kejadian bencana besar yang menyebabkan kerugian yang signifikan selain gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Aceh.

Tabel 1. Kejadian Bencana Besar di Indonesia

Jenis Bencana	Waktu Kejadian	Korban & Kerusakan	Kerugian (US)
Tsunami Aceh	Des 2004	165,708 meninggal	4,450 Juta
Gempabumi Jogjakarta & Jateng	Mei 2006	5,716 meninggal dan sekitar 156,662 rumah	3,134 Juta
Tsunami Pangandaran Jabar	Juli 2006	645 meninggal dan 1,908 rumah rusak	138.7 Juta
Banjir Jakarta	Februari 2007	145,742 rumah rusak/terg	967
Gempa bumi Sumbar	Sept 2009	1.119 meninggal dan 250.578	2.219 Juta

Jenis Bencana	Waktu Kejadian	Korban & Kerusakan	Kerugian (US)
Gempa bumi Lombok	Agustus 2018	71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas kesehatan rusak, 52 unit fasilitas kesehatan, 128 unit fasilitas peribadatan	1,13 Mily ar
Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi Palu	Oktober 2018	Lebih dari 2.000 orang meninggal, 68.451-unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit	1,22 Mily ar
Gempa bumi Sulawesi Barat	Januari 2021	7.863 rumah rusak, 22 fasilitas Kesehatan, jembatan 3 unit, Pelabuhan 1, mini market 1, perkantoran 33, hotel 1, kantor militer 1	54 juta

Jenis Bencana	Waktu Kejadian	Korban & Kerusakan	Kerugian (US)
Gempa bumi Cianjur	21 November 2022	602 orang meninggal dunia, 5 orang hilang, dan 7.810 orang luka-luka 67.504 rumah rusak (21.465 rusak berat),	242 juta
Gempa bumi sumedang	31 Desember 2023	1.325 bangunan rusak, 10 orang luka-luka.	n.a.

Sumber : BNPB 2023

Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai macam bencana yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang sangat signifikan. Akibatnya, masyarakat mulai berpikir tentang cara mengurangi dampak negatif dari bencana tersebut. Upaya ini disebut dengan mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan upaya-upaya untuk mengurangi risiko atau dampak negatif dari bencana ini, seperti dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya, seperti PP No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. Kemudian dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengganti Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Sebelum ini, Bakornas PBP lebih berkonsentrasi pada penanganan kebencanaan dalam situasi darurat. Namun, sekarang BNPB berfokus pada hal-hal yang

terjadi sebelum bencana, yaitu bagaimana mengurangi efek negatif bencana sebelum terjadi. Kini, BNPB telah melakukan banyak upaya pengurangan risiko bencana tersebut, baik secara non-struktural melalui kebijakan-kebijakan, penerbitan peta-peta risiko, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi maupun pelatihan, ataupun secara struktural melalui penguatan bangunan-bangunan publik. Lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua provinsi di Indonesia, kini telah memiliki BPBD. Namun, hanya beberapa kota/kabupaten di Indonesia yang membentuk BPBD, karena menganggap bahwa kota/kabupaten mereka tidak memiliki risiko bencana yang tinggi, sehingga tidak perlu dibentuk BPBD. Selain upaya pengurangan risiko bencana yang berdiri sendiri, Indonesia telah pula berupaya untuk mengintegrasikan upaya mitigasi bencana ini ke dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya adalah ke dalam perencanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tata Ruang, Dimana salah satu pasalnya mengamanatkan agar dilakukan perencanaan tata ruang yang berdasarkan pada upaya mitigasi bencana. Hal ini dianggap penting karena perencanaan dianggap sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi non-struktural (Sutanta, Rajabifard, & Bishop, 2009; Kotter, 2003; Greiving & Fleischhauer, 2006), serta apabila perencanaan tersebut salah maka dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana (Pelling, 2003). Berdasarkan amanat dalam undang-undang tersebut, institusi perencanaan mulai merevisi rencana tata ruang mereka dan berupaya memasukkan isu-isu kebencanaan ke dalam rencana tata ruangnya. Salah satu Upaya yang dilakukan adalah membuat peta bahaya dan apabila

suatu wilayah masuk ke dalam kawasan rawan bencana, maka wilayah tersebut masuk ke dalam kawasan lindung.

Sudah banyak studi-studi terkait kebencanaan, oleh karena itu paper ini bertujuan untuk memetakan penelitian-penelitian terkait teori-teori maupun praktik-praktik yang sudah dilaksanakan terkait dengan kebencanaan.

KAJIAN PUSTAKA

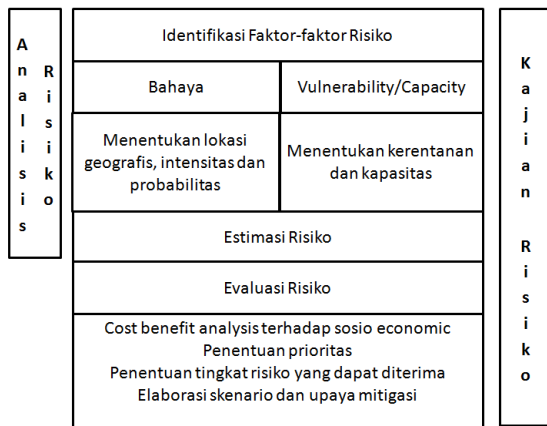
Bencana dan Risiko Bencana

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut UNISDR (2009) bencana adalah gangguan serius dari berfungsinya komunitas yang melibatkan kerugian dan kehilangan materi, manusia bahkan lingkungan, serta hal tersebut berada di luar kemampuan manusia tersebut untuk mengatasinya dengan kemampuan dan sumber dayanya sendiri. Bencana inilah yang kemudian dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan. Dalam kebencanaan, dikenal pula dengan istilah risiko bencana. Risiko bencana adalah suatu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No. 24/2007). Menurut definisi lain, risiko bencana adalah kemungkinan kehilangan apa pun yang dapat terjadi sebagai akibat dari bencana, termasuk kehilangan kehidupan, kesehatan, mata pencaharian,

asset, dan pelayanan yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu (UNISDR, 2009). Perlu diketahui bahwa upaya mitigasi bencana erat kaitannya dengan risiko bencana. Dengan mengetahui tingkat risiko bencana di suatu wilayah, kita dapat menentukan upaya mitigasi yang tepat. mengetahui jenis bahaya yang berpotensi terjadi di suatu wilayah, kondisi kerentanan yang dapat memperburuk dampak negatif jika terjadi bencana, serta kapasitas dalam mengatasi dan menghadapi bencana yang mungkin terjadi, maka dapat ditentukan risiko bencana nya.

Analisis Risiko Bencana

Untuk mengetahui tingkat risiko bencana di suatu wilayah perlu dilakukan suatu analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana merupakan bagian dari kajian risiko bencana (ADRC, ISDR, UN, & WMO, 2002), seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melaksanakan analisis risiko diantaranya adalah identifikasi bahaya potensial di wilayah tersebut, identifikasi kondisi wilayah, termasuk kondisi yang rentan maupun kondisi-kondisi yang dapat dipergunakan sebagai kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana. kondisi ini dapat berupa kondisi fisik, yaitu terkait dengan fisik lingkungan alami maupun kawasan budidaya, termasuk di dalamnya bangunan rumah, bangunan publik, serta infrastruktur, ataupun kondisi non-fisik, yaitu terkait dengan peraturan-peraturan maupun kualitas sumber daya manusianya. Perencanaan tata ruang merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana kondisi kerentanan di wilayah tersebut.



Gambar 1. Skema Kajian Risiko Bencana (ADRC, ISDR, UN, WMO, 2002)

Pengertian Analisis SWOT, Tujuan, Cara Membuat.

SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT merupakan teknik perencanaan strategi yang digunakan untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal untuk membuat rencana bisnis yang efektif. Metode SWOT pertama kali digunakan oleh Albert S Humphrey pada tahun 60-an ketika dia memulai proyek penelitian di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, pebisnis mulai menggunakannya untuk mengembangkan dan memperluas bisnis mereka.

Analisis SWOT mengevaluasi 4 komponen, yaitu:

1. S (Strengths) : kekuatan
2. W (Weakness) : kelemahan
3. O (Opportunities) : peluang
4. T (Threats) : ancaman

Analisis SWOT dimaksudkan untuk membantu kita membuat rencana strategis untuk bisnis berdasarkan hal-hal yang ada saat ini sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.

Faktor analisis SWOT

Analisis SWOT memerlukan pemahaman tentang dua faktor utama, matriks IE/IE Matrix, yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor ini akan membantu

mendapatkan data analisis yang ingin kita buat.

1. Faktor internal

Dalam analisis SWOT, kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh setiap bagian internal bisnis disebut sebagai faktor internal. Faktor-faktor ini biasanya berkaitan dengan pengalaman dan sumber daya yang ada seperti sumber daya fisik (fasilitas, lokasi, dan peralatan); sumber daya manusia (pekerja, sukarelawan, atau target pasar); sumber daya keuangan (pendanaan, pendapatan, dan peluang investasi); dan akses ke sumber daya alam (merek, paten, hak cipta) dan proses saat ini (program karyawan, hierarki departemen atau sistem perangkat lunak).

2. Faktor eksternal

Dalam analisis SWOT, faktor eksternal adalah peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang biasanya diperoleh dari pihak eksternal. Untuk mengetahui faktor eksternal berikutnya, kita dapat mengirimkan survei kepada pelanggan. Dengan memahami elemen eksternal ini, dapat diketahui apa saja yang diperlukan untuk menangani baik peluang maupun ancaman. Perlu diingat bahwa variabel eksternal juga seringkali merupakan hal-hal yang tidak dapat ditangani, seperti:

Demografi, Tren ekonomi (mulai dari tren keuangan lokal, nasional, atau internasional), Tren pasar (seperti produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan konsumen), Pendanaan (seperti donasi, legislatif dan juga sumber lainnya), Hubungan antara distributor dan mitra, Peraturan politik, lingkungan, maupun ekonomi.

Rehabilitasi

Rehabilitasi didefinisikan sebagai serangkaian intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi kecacatan pada individu dengan kondisi kesehatan dalam interaksi dengan lingkungannya". Sederhananya,

rehabilitasi membantu seorang anak, orang dewasa atau orang lanjut usia untuk menjadi mandiri dalam aktivitas sehari-hari dan memungkinkan partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, rekreasi dan peran hidup yang bermakna seperti mengurus keluarga. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan orang tersebut dan keluarganya untuk mengatasi kondisi kesehatan yang mendasarinya dan gejala-gejalanya, memodifikasi lingkungan agar lebih sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan produk bantu, mendidik untuk memperkuat manajemen diri, dan mengadaptasi tugas-tugas sehingga dapat dilakukan dengan lebih baik. dengan aman dan mandiri. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini dapat membantu seseorang; mengatasi kesulitan berpikir, melihat, mendengar, berkomunikasi, makan atau bergerak. Siapa pun mungkin memerlukan rehabilitasi pada suatu saat dalam hidup mereka, setelah cedera, pembedahan, penyakit atau penyakit, atau karena fungsi mereka menurun seiring bertambahnya usia. Perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai di daerah yang telah mengalami bencana adalah tujuan rehabilitasi. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memastikan bahwa berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat kembali normal dan berjalan dengan baik.

Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua fasilitas dan kelembagaan di daerah yang telah mengalami bencana oleh pemerintah atau masyarakat. Tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan

budaya, menjaga hukum dan ketertiban, dan membangkitkan peran masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana adalah :

1. Sektor Perumahan & Permukiman
2. Sektor Infrastruktur Publik
3. Sektor Ekonomi Produktif
4. Sektor Sosial, dan
5. Lintas Sektor

Rehabilitasi & Rekonstruksi dengan 5 (lima) sektor yang menjadi kewenangan, dilaksanakan oleh bidang RR dengan menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011. Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan yang berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang berkaitan dengan aspek pembangunan manusia, perumahan atau permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan hubungan dan nilai.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu review terhadap dokumen-dokumen penanggulangan bencana terkait. Analisis yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik penelitian kualitatif dengan menekankan kejelasan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan symbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011). Benard Berelson (1959) dalam Bungin (2011) mendefinisikan *content analysis* sebagai sebuah Teknik penelitian untuk deskripsi

yang lebih objektif, sistematis, dan deskriptif dari suatu konten komunikasi. Dalam *content analysis* kualitatif dilakukan klasifikasi atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang mewakili aneka isi tertentu (Puspitasari, 2016). Secara teknik analisis ini mencakup beberapa hal, diantaranya: klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, penggunaan kriteria dalam klasifikasi, dan penggunaan analisis tertentu dalam merumuskan suatu prediksi (Bungin, 2011). Logika analisis data ini mirip dengan logika penelitian kuantitatif lainnya. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengkategorikan data menggunakan kriteria tertentu, dan kemudian membuat prediksi konten dengan menggunakan teknik analisis yang berbeda pula (Bungin, 2011). Mereka mempertimbangkan makna, konteks, dan maksud dari pesan. Analisis isi berguna untuk desk-based review dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kondisi eksisting teori dan praktik terkait kebencanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Analisa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di kabupaten Cianjur akhir November 2022, BPBD dan Dinas PUPR kabupaten Cianjur telah melakukan kegiatan sebagai berikut, Proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri melalui empat tahap yang meliputi tahap pertama dengan dana Rp251,35 miliar, tahap kedua Rp436,14 miliar, tahap ketiga Rp1,22 triliun, dan tahap keempat yang kini sedang berjalan Rp846,42 miliar. Dana tahap pertama sampai ketiga yang secara total sebesar Rp1,91 triliun digunakan untuk membangun dan memperbaiki 15.070 unit rumah yang rusak berat, 14.754 rumah rusak sedang, dan 33.103 rumah rusak ringan. Dana tersebut

juga digunakan untuk merelokasi 541 unit rumah yang meliputi 200 unit rumah sudah terisi di Desa Sirnagalih Cilaku, 151 unit rumah yang terisi bertahap di Desa Jammal Mande, dan 190 kartu keluarga (KK) dalam proses penyiapan di Desa Babakan Karef Tercatat dari 1.100 kepala keluarga yang akan menerima pencairan tahap IV, 1.090 diantaranya merupakan penyintas gempa yang rumahnya rusak berat, sedangkan sisanya rumah rusak sedang dan ringan yang masih tinggal di tenda.

Tabel 2 Anggaran Rekonstruksi Rumah

Kategori	Usulan ke BNPB	Total
RB	4.716	Rp282.960.000.000
RS	5.103	Rp153.090.000.000
RR	27.358	Rp410.370.000.000
Total	37.177	Rp846.420.000.000

Sumber : BNPB 2023

Bantuan stimulan tahap IV ini, dibagikan untuk 36.285 kepala keluarga penyintas gempa Cianjur 2022, terdiri atas 4.457 rumah rusak berat, 4.912 rumah rusak sedang, dan 26.916 rumah rusak ringan. Sedangkan total bantuan stimulan perbaikan rumah rusak akibat gempa tahap IV sebesar Rp818,55 juta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan secara simbolis bantuan stimulan tahap IV pembangunan rumah kembali pada 500 orang penyintas gempa

Cianjur, Jumat (7/6) di Pendopo Kabupaten Cianjur.

Tabel 3 Progres Rekonstruksi Rumah

Risteruw Leonardo Firmansyah¹, Said Bambang Nurcahya², Aria Mariany³



Sumber : BNPB 2023

Kelembagaan dalam Manajemen Bencana

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam manajemen bencana, baik dari pendekatannya maupun dari kelembagaannya. Tabel 2 menunjukkan pergeseran paradigma dalam manajemen bencana.

Dalam hal kelembagaan, pada paradigma baru ini, pemerintah yang awalnya hanya sebagai agen tunggal kini mulai menyadari pentingnya melibatkan masyarakat. Masyarakat sebagai korban sekaligus pelaku dalam manajemen bencana. Masyarakat yang pertama kali dapat menolong dirinya sendiri sebelum mendapat bantuan dari orang lain. Selain itu, kini berkembang pula suatu paradigma mengenai ketahanan atau resiliensi masyarakat. Dengan resiliensi masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala (bounce back) (Pearce, 2003; Pamungkas, Bekessy, & Lane, 2011; Mileti, S, & Peek, 2002; Paton, Violanti, & Smith, 2003; Pelling, 2003; Ronan & Johnston, 2005) atau bahkan lebih baik dari sebelum terjadi bencana (better bounce back).

Meskipun di negara-negara yang lebih dulu maju, pergeseran paradigma ini sudah ada sejak dulu, namun di Indonesia baru berkembang setelah kejadian gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu. Kejadian bencana besar yang menimbulkan

ratusan ribu korban jiwa dan merusak bangunan rumah itu telah membuka mata Indonesia akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi bencana yang datangnya dapat secara tiba-tiba, termasuk mempersiapkan kelembagaan terkait kebencanaan.

Tabel 2. Pergeseran Paradigma dalam Manajemen Bencana

Aspek	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Dasar Hukum	Bersifat sektoral	Berlaku umum dan mengikat seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah
Fokus	Bahaya	Kerentanan
Sifat	Reaktif (Tanggap Darurat)	Proaktif (Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)
Kelembagaan	Agen Tunggal (Pemerintah)	Kerjasama (Pemerintah, Masyarakat, organisasi non-pemerintah)
Peran Masyarakat	Terbatas	Melibatkan masyarakat secara aktif
Pendekatan	Science	Multidisiplin
Manajemen	Respon/Tanggap Darurat	Risiko
Perencanaan	Untuk masyarakat	Dengan masyarakat
Komunikasi	Dikomunikasikan pada masyarakat	Dikomunikasikan dengan masyarakat
Pembagian Tanggung Jawab	Sebagian besar pemerintah pusat	Tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten
Perencanaan Pembangunan	Belum menjadi bagian aspek perencanaan pembangunan	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB)
Alokasi Anggaran	Tanggung jawab pemerintah pusat	Tergantung pada tingkatan bencana
Pedoman Penanggulangan Bencana	Terpecah dan bersifat sektoral	Mengacu pada pedoman yang dibuat oleh BNPB dan BPEBD
Keterkaitan Dengan Tata Ruang	Belum menjadi aspek	Aspek bencana harus diperhitungkan dalam penyusunan tata ruang

Sumber: Pearce, 2003; BNPB, 2012

Penanganan Darurat dan Pasca Bencana

Penanganan darurat bencana saat ini masih menjadi tugas besar bagi Indonesia. Beberapa kejadian besar memiliki permasalahan dalam penanganan darurat bencana begitu pun dalam penanganan pasca bencana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan observasi di lapangan, dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Peran Lembaga amal (filantropi) juga mendukung dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana di masa yang akan datang (*build back better*). Sebagai contoh adalah penataan kawasan yang dilakukan oleh Rumah Salman ITB. Rumah Salman ITB menata salah satu kawasan di Desa Gasol, khususnya di Dusun Cikadu, sehingga penataan menjadi lebih tertata. Rumah Salman juga membantu untuk sertifikasi ulang kepemilikan lahan dan rumah warga. Meskipun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumahnya diserahkan kepada masyarakat dengan bantuan stimulus dari pemerintah.

Gambar 3 rekonstruksi Filantropi



Sumber : Salman ITB

Analisa Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Analisa Rehabilitasi dan rekonstruksi dititik beratkan kepada beberapa aspek pemulihan, Pertama Rehabilitasi terhadap Psikologis yang dilakukan oleh komunitas peduli cianjur, yaitu dengan mendatangi tempat berkumpulnya pengungsi yang berada di pendopo Kabupaten Cianjur, Analisa dilakukan menggunakan merehabilitasi fisik dan mental, Adapun data korban yang dirawat di semua rumah sakit Kabupaten Cianjur berjumlah korban luka berat mencapai 574 orang dan luka ringan sebanyak 1.811 orang, 140 orang pasien telah dikirim ke rumah sakit di luar wilayah Cianjur terutama pasien yang memerlukan tindakan operasi sesegera mungkin.

Tabel 3 Rekap pasien di rawat di RS

No	Kecamatan	Dirawat	Satuan
1	CIANJUR	1970	KELUARGA
2	CIBEKER	26	KELUARGA
3	CILAKU	1039	KELUARGA
4	CUGENANG	14543	KELUARGA
5	GEKBRONG	892	KELUARGA
6	KARANGTENGAH	196	KELUARGA
7	MANDE	146	KELUARGA

Risteruw Leonardo Firmansyah¹, Said Bambang Nurcahya², Aria Mariany³

8	PACET	1289	KELUARGA
9	SUKARESMI	737	KELUARGA
10	WARUNGKONDANG	1162	KELUAR

Sumber : Open Data Cianjur 2024

Analisis rekonstruksi, sesuai tabel 2 usulan pembangunan kerusakan rumah terdata awal dengan jenis Rusak berat sebanyak 4.716 rumah, rusak sedang sebanyak 5.103 rumah dan rusak ringan sebanyak 26.368 rumah sehingga total 37.177 rumah yang rusak. Dibandingkan dengan realisasi sampai dengan awal Januari 2024 terbangun sebanyak total 62.932 rumah terjadi penambahan karena data sinkronisasi yang masuk bulan Maret 2023 dinyatakan valid. Adapun rumah dengan lahan yang berbahaya untuk di rehabilitasi sudah direlokasi sebanyak 541 rumah yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Cianjur,

Gambar 4 relokasi rumah tahan gempa



Sumber Kemen PUPR 2023

Analisa SWOT

Dari data rehabilitasi dan rekonstruksi diatas maka dianalisa menggunakan SWOT dengan kombinasikan sebagai berikut :

Kekuatan (Strength)

Rehabilitasi dan rekonstruksi mendapat dukungan dana dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur sehingga dalam penanganan biaya relative lebih ringan daripada biaya sendiri.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahannya dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus menunggu pendataan divalidasi sehingga korban gempa sangat lama berada dirumah penampungan.

Peluang (Opportunity)

Apabila semua pihak berkepentingan Bersatu dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dan penggunaan dana dikelola secara transparan dan diawasi secara berkala, maka sedikit terjadi penyelewengan,

Hambatan (Threats)

Hambatan dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah birokrasi dan data yang belum siap atau tidak lengkap sehingga masyarakat kurang bisa mengakses informasi data dan tata cara rekonstruksi rumah yang rusak/

Strategy SO (Strength-Opportunity)

Kekuatan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mendapat dukungan penuh pendanaan dari pemerintah pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dipadukan dengan penggunaan dana yang transparan dan adanya pengawasan berkala akan menjadi paduan yang sangat solid dan akan melahirkan daerah baru yang tertata rapi dengan bangunan sesuai spesifikasi yang disyaratkan.

Strategy ST (Strength-Threats)

Apabila kekuatan dukungan pendanaan ini dibarengi dengan administrasi dan data yang tertata dengan rapi pasti semua masyarakat yang terdampak bencana akan menerima manfaat berupa Jasmani dan rohani yang sehat dan menerima sarana yang bagus dan bangunan rumah yang tahan gempa.

Strategy WO (Weakness-Opportunity)

Kelemahan dalam keterlambatan validasi dengan menunggu di penampungan yang lama dapat dipersingkat jika transparansi anggaran dan pengawasan secara berkala dapat menjadikan korban terdapat bencana menerima pelayanan Kesehatan dan penggantian perbaikan rumah lebih cepat.

Strategy WT (Weakness-Threats)

Penggabungan strategi ini adalah dalam menunggu validasi di rumah

pengungsian, birokrasi dan data yang belum siap atau tidak lengkap diantisipasi dengan pendataan berkala setiap daerah dan disimpan dalam database yang dapat diakses secara online akan menjadikan daerah ini siap mitigasi bencana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Analisa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur adalah :

1. Jumlah Korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur sebanyak 22.000 yang dirawat di rumah sakit yang tersebar di Jawa Barat dapat di rehabilitasi baik jasmani dan rohani serta psikoterapi yang dapat diukur dari Sebagian besar mereka telah Kembali beraktivitas secara rutin.
2. Jumlah Rekonstruksi rumah yang telah mencapai progress mendekati 95 % dengan total terbangun 62.932 rumah dan terdapat relokasi rumah sebanyak 541 rumah.
3. Dengan dukungan Dana pemerintah dan Penggunaan Anggaran yang diawasi secara ketat serta informasi dan birokrasi yang tersusun rapi maka penganggulan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara cepat, tepat, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Saran dari Analisa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang penulis ajukan adalah :

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Cianjur selalu melakukan pendataan secara berkala bangunan dan infrastruktur dan menyimpan di cloud yang dapat diakses oleh semua pihak.
2. Hendaknya Masyarakat Kabupaten Cianjur diberikan informasi dan sosialisasi mitigasi bencana berbasis

kelurahan sehingga menjadi Tangguh Bencana

3. Hendaknya Rehabilitasi terhadap korban bencana dapat dilakukan secara parsial dan tidak terpusat di tingkat kabupaten.
4. Hendaknya Rekonstruksi terhadap bangunan lebih ditingkatkan dalam kualitas kekuatan dan memperhatikan resiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- ADRC, ISDR, UN, WMO, (2002), *Living with Risk*.
- Ansell, C. & Gash. (2008), *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Publik Administration Research and Theory 18:543-571;
- Armas, I (2008) “*Social Vulnerability and Seismic Risk Perception, Case Study: The Historic Centre of The Bucharest Municipality-Romania*”, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-008-9229-3, Springer.
- Bahri, S. (2022). *Pemenuhan Kebutuhan Bagi Korban Gempa Cianjur Dari Pemerintah, Lembaga Badan Swasta Dan Masyarakat Indonesia*. Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 2(2), 236-240.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.590>
- BNPB. (2012). *Buku Panduan Fasilitator: Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana*. BNPB.
- Brenkert, A.L & Malone, E.L (2005) “*Modelling Vulnerability and Resilience to Climate Change: A Case Study of India and Indian States*”, Climate Change, 72, 57-102.

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Davidson, (1997). *Earthquake Disaster Risk Index*. Disertasi
- De Roo, Gert and Porter, Geoff. (2007). *Fuzzy Planning, The Role of Actors in a Fuzzy Governance Environment*. Hampshire: Ashgate Publ. Limited
- Innes, J.E. & Booher, D.E. (2010). *Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society, in Planning with Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy*. Oxon: Routledge
- Friedmann, John. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. New Jersey: Princeton Univ. Press.
- Forester, John. (2000). *The Deliberative Practitioner Encouraging Participatory Planning Processes*. 2nd printing. London: Massachusetts Institute of Technology.
- Greiving, S., & Fleischhauer, M. (2006). *Spatial Planning Response Towards Natural and Technological Hazards*. In P. Schmidt-Thome, *Natural and Technological Hazards and Risks Affecting the Spatial Development of european Regions* (pp. 109-123). Finland: Geological Survey.
- Hadi, S. (2010). *Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010 – 2012*. Jakarta, Jakarta.
- Healey, P. (2006). *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies*. 2nd ed. New York. Palgrave Macmillan.
- Innes, J.E. (1998). *Information in communicative planning*. American Planning Association. *Journal of the American Planning Association*; Winter 1998; 64, 1; ABI/INFORM Global.
- Innes, J.E. & Booher, D.E. (1999). *Consensus Building as Role Playing and Bricolage. Toward a Theory of Collaborative Planning*. *Journal of the American Planning Association*. Winter 1999: 65, 1. American Planning Association.
- Jailani, M.A., Ali, M., Hasanah S. (2020). *Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat*. *Journal of Government and Politics (JGOP)* ISSN:2686-3391. Vol. 2 No. 2 Desember 2020
- Kotter, T. (2003). *Prevention of Environmental Disasters by Spatial Planning*. 2nd FIG Regional Conference. Morocco: Marrakech.
- Lassa, Jonathan. (2010), *institutional Vulnerability and Governance of Disaster Risk Reduction: Macro, Meso and Micro Scale Assessment (With Case Studies from Indonesia)*. Disertasi. Bonn: Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
- Mileti, Dennis S. & Lori Peek. (2002). *“Understanding Individual and Social Characteristics in the Promotion of Household Disaster Preparedness.”* *New Tools for Environmental Protection: Education, Information, and Voluntary Measures*, edited by T. Dietz and P. C. Stern, pp. 125-139.

- Washington, DC: National Academy Press.
- Mulyasari, Farah. (2014). *Enhancing climate-related disaster resilience through effective risk communication in Bandung, Indonesia*. Dissertation Thesis: Kyoto University
- Norris, Fran H., Stevens, Susan P., Pfefferbaum, Betty, Wyche, Karen F., Pfefferbaum, Rose L. (2007). *Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness*. *Am J Community Psychol* (2008) 41:127–150
- Pamungkas, A., Bekessy, S. A., & Lane, R. (2011). Assessing the Benefits to Community Vulnerability of Proactive Adaptations for Disaster Risk Management. Building Resilience International Seminar. Colombo, Srilanka.
- Paton, D., Violanti, J.M., & Smith L.M. (2003), Promoting Capabilities to Manage posttraumatic stress: Perspectives on resilience, Charles C Thomas, Springfield, Illinois
- Pearce, L. (2003). Disaster Management and Community Planning, and Public Participation: How to Achieve Sustainable Hazard Mitigation, *Natural Hazards*, vol. 28, pp. 211-22
- Pelling, M. (2003). *The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience*. Londong: Earthscan.
- Puspitasari, S.V. (2016). *Persepsi Anak Yatim terhadap Sosok dan Peran Ayah*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma (Skripsi tidak diterbitkan)
- Ronan K.R. & Johnston D.M. (2005). *Promoting Community Resilience in Disasters: The Role for Schools, Youth and Families*, Springer Science, USA
- Sengara, I. W., & Suarjana, M. (2012). *Earthquake Damage Model as Function of MMI*. Bandung: PPMB ITB.
- Sutanta, H., Rajabifard, A., & Bishop, I. D. (2009). *An Integrated Approach for Disaster Risk Reduction using Spatial Planning and SDI Platform*. *Surveying & Spatial Sciences Insistute Biennial International Conference* (pp. 341-351). Adlaide: Surveying & Spatial Sciences Institute.
- Woltjer, Johan. (2000). *Consensus Planning, The relevance of Communicative Planning Theory in Dutch Infrastructure Development*. Hampshire: Ashgate Publ. Limited.
- Zer-Aviv, Mushon. (2014). *Visualising Information for Advocacy*.